



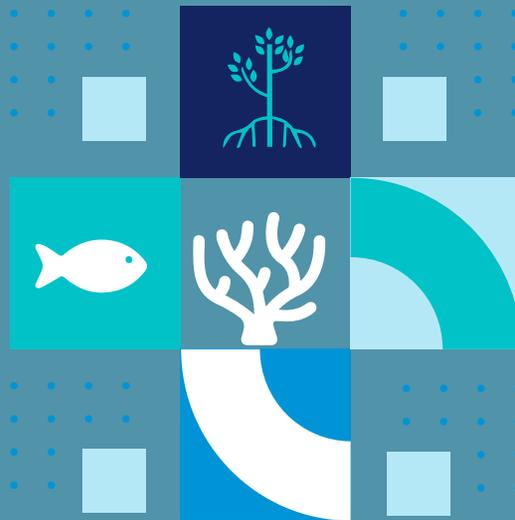
PROFILE PROGRAM

COREMAP - CTI

Papua Barat & Nusa Tenggara Timur

Melestarikan Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat





PENDAHULUAN

Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program strategis ini akan menghasilkan model inovasi pembangunan terutama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan serta mendukung upaya penanganan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2017 dan 2019 dilakukan restrukturisasi COREMAP-CTI yang menghasilkan perubahan pelaksana kegiatan. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana hibah **Global Environmental Facility (GEF)** yang dikelola oleh World Bank. Kegiatan ini dilaksanakan melalui satuan kerja **Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)** sebagai satu-satunya Lembaga nasional dana perwalian untuk perubahan iklim di Indonesia.

Hasil restrukturisasi juga menambahkan tujuan program untuk kegiatan hibah yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan pesisir prioritas dengan target capaian efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi mencapai 75% level biru.



SEKILAS COREMAP-CTI

Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menginisiasi sebuah program pelestarian terumbu karang yang dikenal dengan nama COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program) atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. COREMAP hadir sebagai respon keprihatinan dunia atas degradasi kualitas wilayah pesisir terutama ekosistem terumbu karang. Program jangka panjang ini bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.



Inisiasi:

mengembangkan landasan berupa data guna menyusun kerangka kerja untuk pengelolaan terumbu karang di daerah prioritas

Percepatan:

Pemberdayaan Masyarakat yang mendukung pengelolaan secara berkelanjutan terumbu karang dan ekosistem terkait

Pelebagaan:

Kelembagaan dalam monitoring ekosistem pesisir dan penelitian untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas

Pada tahun 2017 dan 2019 pemerintah Indonesia menyampaikan permintaan formal untuk melakukan restrukturisasi proyek COREMAP-CTI. Restrukturisasi program ditujukan untuk lebih menitik beratkan penguatan terhadap kapasitas kelembagaan pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi berbasis bukti, sebagai respon peningkatan kebutuhan riset.

Sebagai kelanjutannya, LIPI ditunjuk sebagai lembaga pelaksana, peran yang sebelumnya dipegang oleh KKP. Hasil restrukturisasi ini salah satunya adalah mengamankan Bappenas melalui ICCTF untuk melaksanakan kegiatan yang didanai oleh hibah *Global Environment Facility* yang dikelola oleh World Bank dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem prioritas melalui pendekatan strategis.



Piaynemo Geosite, Raja Ampat, Papua Barat

Wilayah lokasi kegiatan COREMAP-CTI di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat adalah:

- Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, Papua Barat
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat, Papua Barat

Implementasi kegiatan COREMAP-CTI yang dilakukan oleh ICCTF-Bappenas sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai enabler dalam pengembangan kawasan perairan secara terpadu untuk menghasilkan model inovasi pembangunan pesisir yang dapat direplikasi oleh daerah lain.



POKMASWAS Desa Kenduwela NTT

KOMPONEN KEGIATAN COREMAP-CTI DAN SUB KOMPONENNYA

KOMPONEN 3 mencapai 75% level biru Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas

3.1 Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Jenis Terancam

- 1 Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat
- 2 Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di TNP laut Sawu
- 3 Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ *National Plan of Action (NPOA)* Jenis Terancam

3.2 Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu

- 4 Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*

3.2 Penatalayanan Sumber Daya Pesisir oleh Masyarakat

- 5 Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- 6 Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat





Paket Kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP-CTI) Dana Hibah Bank Dunia



Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat

Mitra Pelaksana:
Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)



Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di TNP laut Sawu

Mitra Pelaksana:
Perkumpulan Pemberdaya Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)



Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) / Jenis Terancam

Mitra Pelaksana:
Reef Check Indonesia



Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Mitra Pelaksana:
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB)



Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Mitra Pelaksana:
Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)



Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat

Mitra Pelaksana:
Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)



PAKET-1

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat

Mitra Pelaksana:
Yayasan Terumbu Karang
Indonesia (Terangi)



LATAR BELAKANG

Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia (Coral Triangle) yang memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi seperti 1.318 jenis ikan, 699 jenis moluska dan 537 jenis hewan karang. Potensi ini menarik untuk pengembangan usaha ekowisata dan telah pula diusulkan sebagai Lokasi Warisan Dunia (*World Heritage Site*) oleh pemerintah pusat. Sebagai upaya perlindungan, Kabupaten Raja Ampat memiliki beberapa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seperti: SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Selat Dampier dan yang lainnya. Masyarakat setempat selaku pemanfaat sumberdaya dalam kawasan konservasi dihadapkan pada pilihan antara konservasi dengan ekonomi. Di satu sisi, kawasan konservasi tidak hanya memerlukan dukungan masyarakat lokal, namun juga membutuhkan dana dalam pengelolaannya. Pengembangan ekowisata dapat menjadi solusi dengan memberikan insentif dalam bentuk mata pencaharian bagi masyarakat serta perlindungan konservasi bagi lingkungan.

INFORMASI PROYEK

Pelaksana:
COREMAP – CTI WB
Indonesia Climate ChangeTrust
Fund (ICCTF) - Kementerian PPN/
Bappenas

Mitra Pelaksana:
Yayasan Terumbu
Karang Indonesia
(TERANGI)

Periode:
Agustus 2020 - Maret 2022

Total Hibah:
USD 1.245.300

Tujuan:
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) melalui ekowisata bahari dan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat.



CAPAIAN PROGRAM

1. Peningkatan Kapasitas SDM di KKP Raja Ampat

- 95 orang meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam hal rehabilitasi ekosistem pesisir
- 20 orang tersertifikasi pada bidang pertolongan pertama pada kecelakaan di perairan (first aid)
- 17 orang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pemanduan wisata selam
- 23 orang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pemanduan wisata snorkeling
- 20 orang tersertifikasi Standar kompetensi kerja Khusus (SKKK) Penilai Terumbu Karang
- 20 orang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Penilai Biodiversitas Ikan Terumbu Karang
- 57 orang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi level pelaksana
- 15 orang tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi level teknis

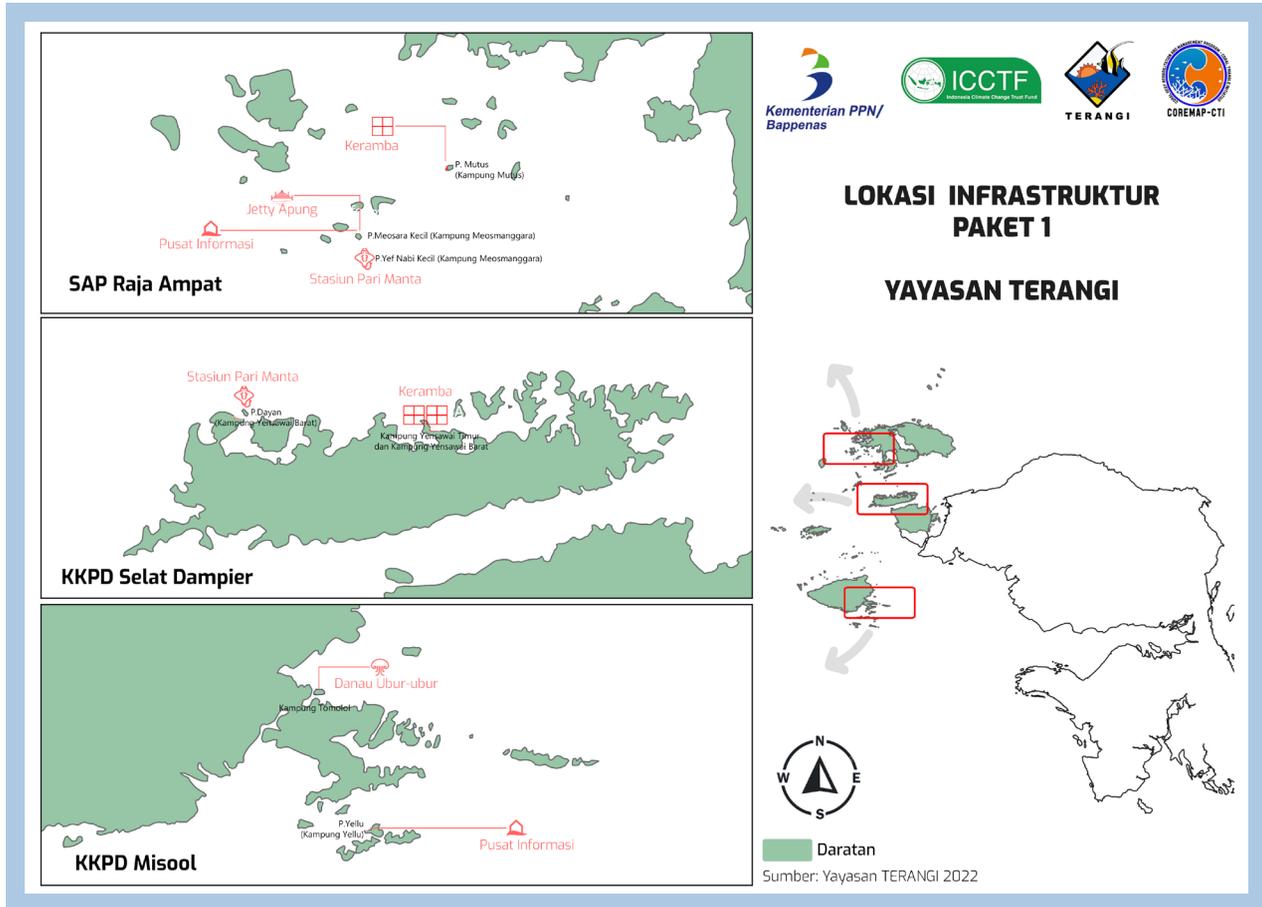
2. Sarana dan prasarana ekowisata bahari

- 1 stasiun pemantauan pari manta di KKPD Selat Dampier (Pulau Dayan, Kampung Yensawai Barat)
- 1 stasiun pemantauan pari manta di SAP Raja Ampat (Pulau Yef Nabi Kecil, Kampung Meosmanggara)
- 1 pusat informasi ekowisata di SAP Raja Ampat (Pulau Meosara Kecil, Kampung Meosmanggara)
- 1 pusat informasi ekowisata di KKPD Misool (Kampung Yellu)
- 1 jeti apung di SAP Raja Ampat (Pulau Meosara Kecil, Kampung Meosmanggara)
- 1 trek ekowisata danau ubur-ubur di KKPD Misool (Kampung Tomolol)

3. Pengembangan mata pencaharian dan ekonomi

- Terbangunnya 2 keramba jaring apung di KKPD Selat Dampier (1 di Kampung Yensawai Barat dan 1 di Yensawai Timur)
- Terbangunnya 1 keramba jaring apung di SAP Raja Ampat (Kampung Mutus)
- Tersedianya 6 paket peralatan untuk pengolahan panganan lokal dari hasil perikanan
- Tersedianya 8 instalasi lemari pendingin dengan solar pv
- Tersedianya 6 paket alat/teknologi pengurangan *bycatch*
- Tersedianya website promosi produk ekowisata dan perikanan

PETA LOKASI



PEMBELAJARAN

- Dalam menjangkau target yang lebih banyak, lemari pendingin digunakan untuk membuat es batu dibanding dengan menyimpan hasil tangkapan
- Sertifikasi Kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing SDM, sekaligus dapat meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan (EVIKA)
- Pelibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan setempat secara aktif sesuai dengan fungsinya untuk membantu tercapainya program

DOKUMENTASI KEGIATAN



Keramba Jaringan Apung KKPD
Selat Dampier



Pemantauan Ekosistem
Pesisir Berbasis Masyarakat



Stasiun Pemantauan
Pari Manta dan Hiu



Pemantauan Ekosistem
Pesisir Berbasis Masyarakat



Asesmen Perencanaan
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan



Meeting Working Group
Regional-CTI



Loklatih Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Mangrove, Lamun, Terumbu Karang) di Meos Manggara, Yensawai, Waisai dan Misool





PAKET-2

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Berkelanjutan oleh Masyarakat di Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Mitra Pelaksana:
YAPEKA



LATAR BELAKANG

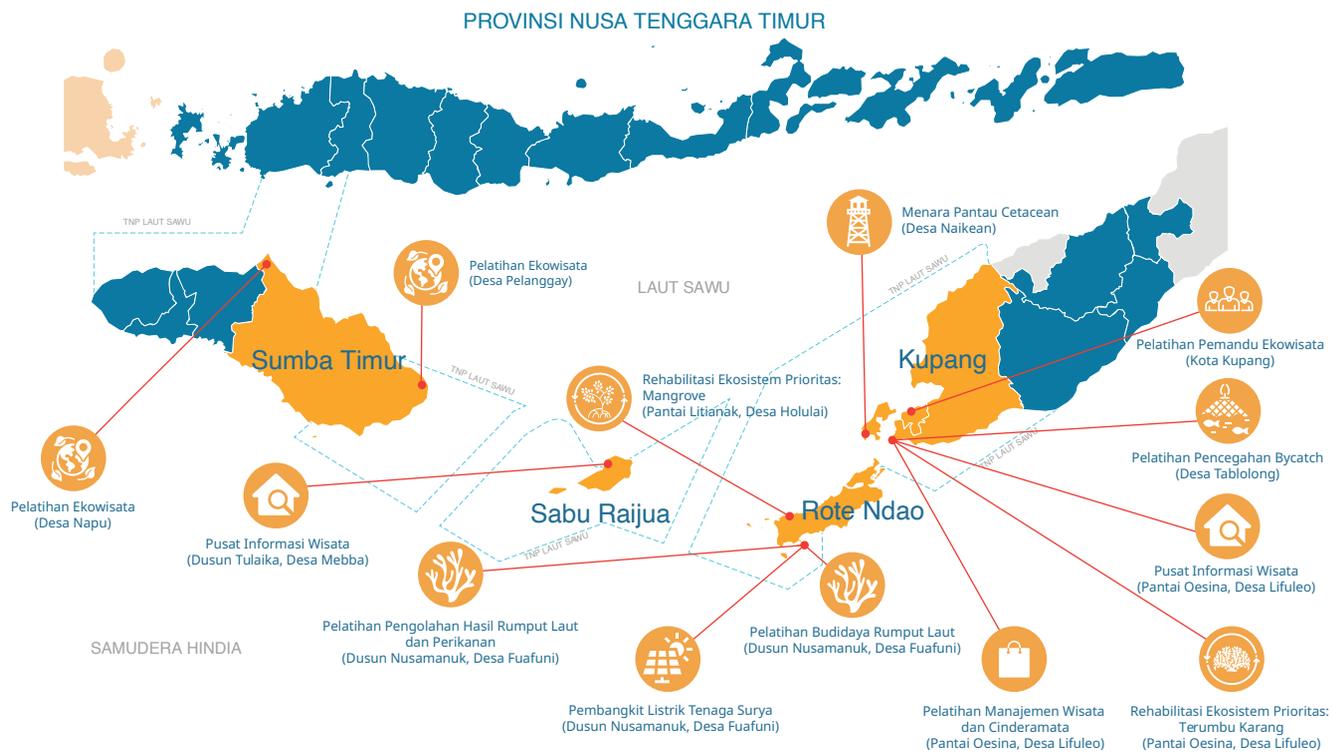
Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu adalah salah satu kawasan konservasi perairan (KKP) yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KKP ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah, termasuk berbagai jenis *Cetacean* (paus, lumba-lumba, dsb) serta *Sirenian* (Dugong). Selain itu Laut Sawu juga kaya akan berbagai ekosistem pesisir yang merupakan sumber blue carbon terutama mangrove dan padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kawasan ini juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dari sektor perikanan dan pariwisata.

Potensi wisata di perairan TNP Laut Sawu meliputi wisata pengamatan mamalia laut, wisata selam, wisata selancar dan wisata pantai lainnya. Sedikitnya, lebih dari 30 potensi lokasi wisata telah diidentifikasi di TNP Laut Sawu (BKKPN Kupang, 2015) yang meliputi kawasan pesisir/perairan Kabupaten Sumba Timur, kawasan pesisir/perairan selatan Manggarai Barat, kawasan pesisir/perairan Pulau Rote, Pulau Sabu, dan kawasan perairan/pesisir Kabupaten/Kota Kupang.

Guna mendorong penyiapan dan pengembangan model percepatan pengelolaan pesisir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mengimplementasikan proyek The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). COREMAP-CTI merupakan program perlindungan ekosistem terumbu karang yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk monitoring dan penelitian ekosistem pesisir guna menghasilkan informasi berbasis data, serta peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Tujuan Komponen 3 COREMAP-



CTI adalah Peningkatan nilai efektivitas pengelolaan ekosistem target menuju setidaknya 75% level biru. YAPEKA (Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam) adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan Proyek COREMAP-CTI, khususnya untuk pelaksanaan Paket 2: “Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat Secara Berkelanjutan di Laut Sawu”. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Paket 2, YAPEKA berkonsorsium dengan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), Yayasan Penabulu dan Indonesia Ocean Pride (IOP).



5 Modul Pelatihan	1 Dokumen Kajian Investasi Ekowisata	1 Dokumen Policy Brief	1 Dokumen SOP Pengembangan Ekowisata bahari	6 Lembaga Pokdarwis	3 Infrastruktur Pendukung Ekowisata
1 PLTS-tersebar Pendukung Kegiatan Perikanan	7 Desa Dampingan	19 Pemandu Wisata Tersertifikasi	40 Masyarakat Terlatih*	24 Pemandu Wisata Terlatih	

* dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem prioritas



Infrastruktur Pendukung Ekowisata

Salah satu upaya pemanfaatan TNP Laut Sawu yang dapat dikembangkan adalah kegiatan pariwisata alam perairan; mengingat kawasan TNP laut Sawu memiliki daya tarik wisata alam perairan yang unik dan cukup beragam seperti pengamatan biota laut besar seperti kelompok *Cetacean* (paus dan lumba-lumba), Dugong, Pari Manta dan juga Penyu, daya tarik wisata penunjang seperti aktivitas di pantai, snorkeling, diving, dan memancing banyak terdapat di perairan laut sawu; di samping daya tarik wisata penunjang lainnya di daratan (seperti di Pulau Rote, Sabu dan Sumba) yang meliputi keanekaragaman budaya, kerajinan dan ritual-ritual adat yang khas. Pengembangan pariwisata alam perairan dengan pendekatan ekowisata diharapkan dapat lebih menjamin keberlanjutan perekonomian masyarakat, ekosistem maupun budaya setempat.

YAPEKA melalui kegiatan paket 2 COREMAP CTI, membangun 2 unit Pusat Informasi Ekowisata (PIE) TNP Laut Sawu, serta 1 unit Menara Pantau *Cetacea* sebagai infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata alam perairan di Laut Sawu. PIE yang terletak di Pulau Sabu dan Pantai Oesina Kabupaten Kupang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai destinasi ekowisata di sekitar TNP Laut Sawu, di samping sebagai sarana pendidikan tentang keanekaragaman hayati dan konservasi. PIE juga dilengkapi dengan berbagai infografis mengenai ekosistem perairan, upaya konservasi serta kerangka paus sebagai sarana edukasi mengenai mammalia laut dari kelompok Ordo *Cetacea* (paus dan lumba-lumba).

Listrik Untuk Perikanan Yang Lebih Baik

Pulau Nusamanuk adalah salah satu kampung binaan YAPEKA dengan pendanaan dari Proyek COREMAP – CTI di TNP Laut Sawu. Terletak di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Nusamanuk didiami oleh 22 Kepala Keluarga yang seluruhnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani rumput laut. Potensi rumput laut di kawasan TNP Laut Sawu banyak terdapat di Kabupaten Rote dengan potensi lahan sekitar 32.000 Ha, namun kegiatan budidaya rumput laut yang telah dikembangkan baru sekitar 10% atau seluas 3,200 Ha. Pulau Nusamanuk sendiri merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut di Kabupaten Rote. Untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya rumput laut dan perikanan pada umumnya di Pulau Nusamanuk, YAPEKA melalui pendanaan dari COREMAP – CTI melakukan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sejak Maret 2021, masyarakat bisa menikmati listrik untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di Pulau Nusamanuk. Salah satu warga menyampaikan, kini mereka bisa bekerja untuk menyiapkan bibit rumput laut hingga malam hari, sehingga pagi hari mereka bisa langsung menanamnya di laut. Listrik juga memungkinkan masyarakat Nusamanuk untuk melakukan pengolahan pasca panen rumput laut, teripang dan ikan menjadi oleh – oleh khas Kabupaten Rote. Melalui pelatihan dari YAPEKA, masyarakat Nusamanuk bisa membuat manisan rumput laut, kerupuk rumput laut, kerupuk teripang dan teripang bumbu yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi.

Memperkuat Sumberdaya Manusia untuk Pengelolaan Ekowisata dan Perikanan Berkelanjutan

YAPEKA melalui Kegiatan Paket 2 COREMAP CTI melaksanakan pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi Pemandu Ekowisata dan Operator Wisata Alam Perairan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu, YAPEKA juga memberikan pelatihan manajemen ekowisata, pelatihan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang bagi POKDARWIS di desa-desa dampingan di Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote





Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua. Peningkatan sumber daya manusia juga dilaksanakan untuk nelayan dalam kegiatan pengolahan hasil rumput laut dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao. Dengan pendanaan dari Proyek COREMAP – CTI di TNP Laut Sawu, YAPEKA juga melakukan pelatihan dan pemasangan alat pencegah *bycatch* (tangkapan samping) untuk mencegah lumba lumba dan penyu ikut tertangkap. Alat ini diharapkan bisa membantu para nelayan mendapatkan penghasilan tanpa takut melanggar hukum, dan yang tidak kalah penting menjaga kelestarian biota-biota laut dilindungi di TNP Laut Sawu

Mempertahankan Tanah Leluhur Dengan Ekowisata Berbasis Masyarakat.

Pulau Sumba, termasuk Kabupaten Sumba Timur saat ini menjadi primadona wisata baru di Provinsi NTT. Desa Napu dan Palanggay di Kabupaten Sumba Timur merupakan lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek ekowisata alam perairan. Di Pantai Larawali Desa Napu Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Saat ini, setiap minggu sudah ada kelompok pecinta sport fishing yang rutin berkunjung. Selain itu, Desa Napu juga memiliki pantai pasir putih yang membentang lebih dari satu kilo meter dan menjadi lokasi peneluran penyu. Tidak hanya itu, salah satu tanjung di Desa Napu menjadi lokasi yang dikeramatkan bagi Masyarakat Adat di Sumba Timur dan tidak sedikit yang datang untuk mendoakan leluhurnya di lokasi ini.

Dengan potensi pariwisata yang cukup besar di Desa Napu dan Desa Palanggay, YAPEKA bersama mitra dan didukung pendanaan dari Proyek COREMAP - CTI melakukan pendampingan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Saat ini ke dua desa tersebut telah memiliki Kelompok Sadar Wisata yang siap untuk menjalankan pariwisata di desanya. Sarana pendukung seperti gapura, papan petunjuk lokasi wisata, pondok informasi dan beberapa lopo lopo (gazebo) sudah siap digunakan. Promosi wisata dan paket wisata mulai dijalankan untuk menarik wisatawan yang lebih banyak.

Bapak Domianus, selaku sekretaris di Desa Napu menyampaikan bahwa masyarakat Desa Napu sangat antusias untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata. Melalui pariwisata berbasis masyarakat, mereka yakin bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tetap mempertahankan tanah leluhurnya dari investor yang ingin menguasai lahan masyarakat. Beberapa tahun lalu, Bapak Domianus merupakan salah satu perangkat desa yang ikut menolak investor masuk ke desanya. Menurut beliau, lahan di Desa Napu adalah milik masyarakat Adat dan akan tetap seperti itu.

Memperkuat Pengelolaan Pariwisata Alam Perairan

Di samping pengadaan infrastruktur pendukung ekowisata, YAPEKA melalui kegiatan Paket 2 COREMAP CTI juga memperkuat pengelolaan pariwisata alam perairan. Suatu kajian kelayakan investasi ekowisata di TNP Laut Sawu telah dilaksanakan, dan berdasarkan kajian tersebut, YAPEKA bekerjasama dengan BKKPN Kupang mengembangkan Panduan/SOP Pariwisata Alam Perairan di TNP Laut Sawu. Suatu *Policy Brief* mengenai Pengembangan Ekowisata di kawasan TNP Laut Sawu juga telah disiapkan dan didiseminasikan ke para *stakeholders* kawasan Laut Sawu di NTT.





PAKET-3

Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Jenis Terancam

Mitra Pelaksana:
Yayasan Reef
Check Indonesia



RAJA AMPAT

Penerapan sains dan teknologi dalam mendukung pengelolaan Pari Manta dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan



MANGGARAI

Penerapan sains dan teknologi dalam mitigasi tangkapan samping (*bycatch*) elasmobranch, sebagai upaya mendukung perikanan berkelanjutan

KUPANG, ROTE

Penerapan sains dan teknologi dalam mendukung pengelolaan *Cetacea* (Lumba-lumba dan Paus) dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Populasi hiu karang, pari manta dan *cetacea* sedang mengalami tekanan akibat kegiatan perikanan dan pariwisata yang belum dilakukan secara bertanggung jawab, serta polusi di laut yang terus meningkat. Perikanan (ditargetkan maupun *bycatch*) berperan langsung terhadap penurunan populasi hiu karang, pari manta, dan *cetacea*. Sementara, kelalaian pengelolaan wisata dan polusi dapat menyebabkan ketidak-sesuaian/ degradasi habitat yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dari spesies tersebut. Untuk itu, penguatan kajian dan pengelolaan spesies terancam punah seperti hiu karang, pari manta, dan *cetacea* sangat dibutuhkan untuk memastikan kelestarian spesies tersebut



KELUARAN

- Rangkaian kajian dan penyusunan panduan laku wisata untuk memperkuat kebijakan nasional tentang hiu karang, pari manta, dan *cetacea*
- Peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan hiu karang, pari manta, dan *cetacea*
- Pengembangan bisnis wisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan

INFORMASI PROYEK

Pelaksana:

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP – CTI)
World Bank - Indonesia Climate Change Trust Fund Kementerian PPN/Bappenas

Mitra Pelaksana:

Yayasan Reef Check Indonesia

Periode:

Agustus 2020 - Maret 2022

Total Hibah:

USD 967.000

Tujuan:

Meningkatkan efektivitas konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan Hiu Karang, Pari Manta, dan *Cetacea* melalui penerapan kebijakan berbasis sains dan peran aktif masyarakat

Lokasi:

TNP Laut Sawu, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Selat Dampier

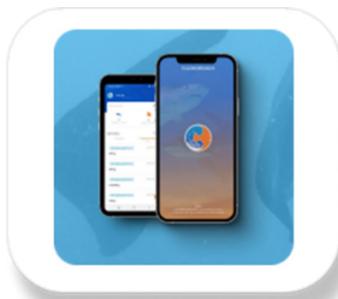
CAPAIAN PROGRAM

- Dua aplikasi pendataan tersedia di AppStore dan Google Play: “Elasmobranch” dan “Reefcheck Cetacea”. Database hasil diakses di reefcheck.or.id
- Data hasil enumerasi pendataan elasmobranch di Papua Barat bulan Mei 2021 - Januari 2022 beserta laporan kajiannya.
- Panduan penggunaan lampu LED dan penanganan bycatch serta laporan kajian kelayakan penggunaan lampu LED sebagai alat mitigasi bycatch elasmobranch di Indonesia, secara khusus di TNP Laut Sawu
- Lima penanda satelit & 6 penanda akustik terpasang pada pari manta, beserta 3 receiver akustik terpasang di Perairan Raja Ampat (KKPD Selat Dampier, SAP Raja Ampat, dan SAP Waigeo Barat)
- Tiga puluh lima identifikasi fotografi pari manta
- Pembahasan hasil kajian sensus populasi dan pola pergerakan pari manta di Raja Ampat, Papua Barat
- Pengumpulan dan analisis 20 sampel genetika cetacea di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan cetacea di Indonesia dan khususnya di TNP Sawu dan Raja Ampat
- Survey untuk kajian kelimpahan relatif dan analisis kecocokan habitat cetacea di TNP Sawu
- Pemasangan 3 penanda satelit untuk identifikasi pola pergerakan cetacea di TNP Laut Sawu
- Satu kajian hotspot cetacea yang terdampar di Indonesia
- Dokumen panduan laku wisata berkelanjutan hiu karang, pari manta, dan cetacea
- Rekomendasi kebijakan-kebijakan berdasarkan masukan para pihak dan hasil-hasil temuan kegiatan-kegiatan di Paket 3 ICCTF
- Produk komunikasi untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hiu, pari, dan cetacea

- Pertemuan sosialisasi regulasi dan konservasi hiu, pari manta, dan cetacean di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu
- 1 dokumen modul penanganan cetacea terdampar ukuran besar dan dalam jumlah massal
- Workshop pengoperasian mobile apps dan sistem database sensus populasi, serta pengaplikasian akustik dan satelit telemetri dalam mendukung konservasi pari manta
- Workshop tagging, biopsy, survey kelimpahan relative, dan platform database cetacean
- Pelatihan penanganan kejadian mamalia laut terdampar untuk dokter hewan dan penanggap pertama
- Penguatan jejaring penanganan mamalia laut terdampar di NTT dan Nasional
- Brosur dan video panduan penanganan cetacea terdampar
- Pertemuan sosialisasi panduan laku wisata hiu karang, pari manta, dan cetacea ke potensi pelaku wisata
- Bimbingan teknis wisata spesies berbasis masyarakat berkelanjutan di 3 lokasi terpilih di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu
- Rangkaian peningkatan kapasitas WSBM dan industri penunjang, serta teori dasar akutansi, administrasi, dan komunikasi bisnis yang melibatkan setidaknya 120 peserta
- Uji coba Wisata Spesies Berbasis Masyarakat (WSBM) di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu
- Tersedianya brosur wisata dan tag penjualan
- Terlaksananya media trip WSBM di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu
- Pemberitaan lokal tentang kegiatan WSBM di Raja Ampat dan Laut Sawu
- Tersedianya informasi keterlibatan jejaring pemasaran dalam mendukung pengembangan bisnis masyarakat (setidaknya 30 institusi)
- Pembentukan dan penguatan jejaring WSBM dengan nama DOMANI TIMUR KR4SERO (Kupang Raja Ampat Semau Rote)
- Dokumen bisnis wisata dan juknis wisata spesies berbasis masyarakat yang berkelanjutan

PEMBELAJARAN

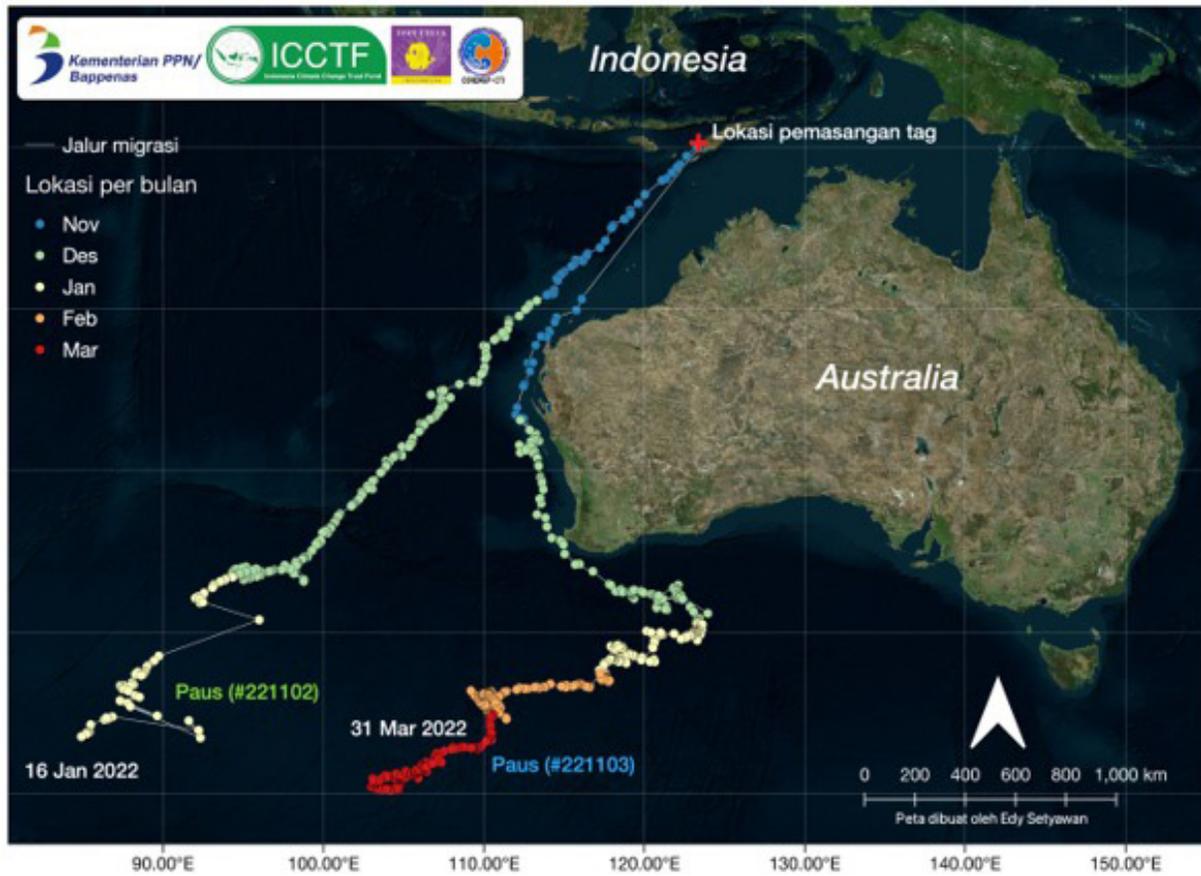
- Kolaborasi bersama pemangku kepentingan membantu pelaksanaan, terutama meningkatkan jaminan keberlanjutan kegiatan. Dalam hal ini, Yayasan Reef Check Indonesia #KerjaBersama dengan otoritas kawasan, yaitu BKKPN Kupang dan BLUD UPTD KKP Raja Ampat
- Penggunaan teknologi dalam kajian secara efisien, membantu menghasilkan data dan informasi yang holistik dalam rangka konservasi spesies jenis terancam
- Pelibatan masyarakat sejak dini dalam pengembangan wisata spesies, selain meningkatkan perekonomian, juga meningkatkan kesadaran terhadap spesies jenis terancam



Aplikasi Elasmobranch yang bisa diunduh di AppStore dan Google Play



Pengambilan identifikasi fotografi pada pari manta di Raja Ampat





PAKET-4

Implementasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Mitra Pelaksana:

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB)



LATAR BELAKANG

Saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pembangunan pesisir dan laut diberbagai sektor. Untuk itu, perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil komponen utama dalam menentukan arah pembangunan dan jaminan investasi. Tetapi, Implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diperkirakan akan terjadi tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi/pemanfaatan sumberdaya yang tidak saling mendukung bahkan tidak saling menegaskan satu sama lain. Selain itu, konflik sosial di level akar rumput juga akan terjadi karena RZWP-3-K dalam proses perencanaannya kurang mampu melibatkan peran masyarakat di level terendah, belum tersosialisasi, dapat membatasi akses-akses masyarakat yang telah menjadi sumber penghidupan dan aktivitas sehari-hari dan belum memiliki pedoman teknis dalam implementasinya. RZWP-3-K diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, serta menjamin kepastian hukum dalam investasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya instrumen yang tepat dalam implementasinya, yaitu protokol RZWP-3-K dengan kerangka ICZM.



INFORMASI PROYEK

Pelaksana:

COREMAP-CTI WB
Indonesia Climate Change Trust
Fund (ICCTF) - Kementerian PPN/
Bappenas

Periode:

Agustus 2020 - Maret 2022

Lokasi:

Provinsi Papua Barat

Total Hibah:

USD 869.000

Mitra Pelaksana:

Pusat Kajian Sumberdaya
Pesisir dan Lautan -
Institut Pertanian Bogor
(PKSPL IPB)

Tujuan:

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan
RZWP3K Provinsi Papua Barat dan KKP/
KKPD di Provinsi Papua Barat, pada
khususnya Kabupaten Raja Ampat

Dokumen Kajian Hasil Survey dan Aplikasi yang Telah Dikembangkan

- Dokumen platform tata Kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)
- Dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi
- Survey dan pengumpulan data rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K di Manokwari dan Raja Ampat
- Survey dan pengambilan data rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung di Sorong dan Raja Ampat
- Ujicoba dan pendampingan sistem monitoring dan evaluasi RZWP-3-K (SIMON) dari Provinsi Papua Barat
- Dokumen Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K
- Dokumen Rencana teknis dan SOP pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung,
- Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K (SIMON)

Workshop, Training, Meeting yang Telah Dilakukan

- Workshop implementasi platform ICZM di Provinsi Papua Barat
- FGD Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K dengan para pihak (Manokwari dan Raja Ampat)
- Rapat koordinasi rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung dengan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat
- Diseminasi dan pelatihan aplikasi sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K di provinsi Papua Barat
- Training dan workshop ICZM level pemangku kepentingan Provinsi Papua Barat
- Workshop pengelolaan perikanan
- Pelatihan bioekonomi untuk praktek pengelolaan perikanan
- Workshop pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan tema “kebijakan pengembangan *fisheries* dan *aqua culture estate*: peluang atau ancaman di Jakarta”

- Pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (*coastalzone planning*) di Manokwari
- Pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal yang dilaksanakan di Waisai, Raja Ampat
- Diskusi awal keberlanjutan program rehabilitasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat
- Workshop pembahasan studi mendalam penilaian kondisi, pemilihan ekosistem dan lokasi serta metode rehabilitasi
- *Training of trainer* (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM
- Workshop penyusunan *leasson learned* program rehabilitasi ekosistem kritis
- Workshop finalisasi rencana teknis dan SOP pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung dan Workshop strategi keberlanjutan program ICZM

Kegiatan



Training Workshop ICM Level Pemangku Kepentingan di Provinsi Papua Barat



Pembentukan Kelompok Pengelola Ekosistem Terumbu Karang Kampung Yensawai oleh Tim Rehabilitasi PKSPL IPB



Workshop Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Bioekonomi



Kegiatan Monitoring Ekosistem Terumbu Karang Kampung Yensawai oleh Tim Rehabilitasi PKSPL IPB



Penanaman propagul mangrove



Penanaman fragmen karang



Kampanye publik di SD Lahoroi, Kampung Yensawai Barat



Rehabilitasi Lamun

Jumlah yang direhabilitasi:



7530

propagul mangrove



1521

rumpun bibit lamun



1650

fragmen karang

**Jumlah tersebut melebihi dari target deliverable awal rehabilitasi ekosistem kritis yakni:

- **1600 fragmen terumbu karang** terrehabilitasi
- **5000 propagul mangrove** terrehabilitasi
- **500 bibit lamun** terrehabilitasi

Luasan rehabilitasi ekosistem:

1. 100 m² (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terrehabilitasi
2. 1.000 m² (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terrehabilitasi
3. 500 m² (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terrehabilitasi

Peta lokasi, desa dan penerima manfaat yang terlibat:

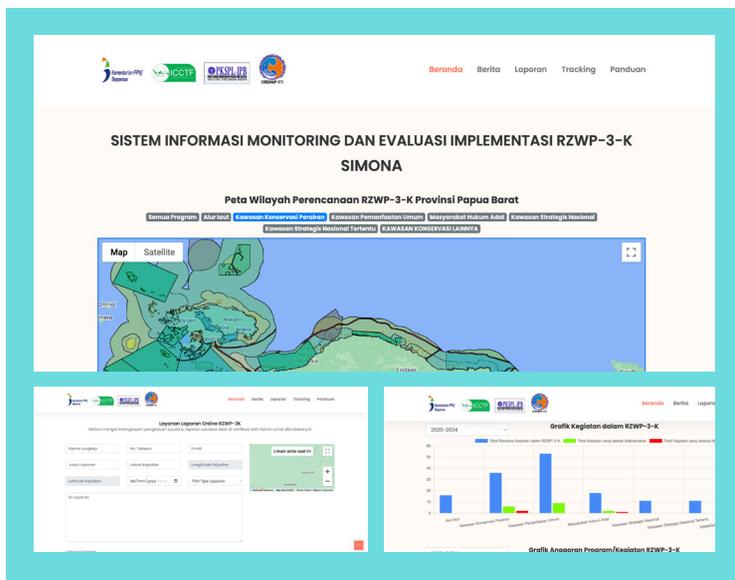
Kampung Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat



3 Kelompok pendamping (total 60 orang):

- Kelompok ekosistem terumbu karang
- Kelompok lamun (andoi)
- Kelompok mangrove (korbon)

Infrastruktur yang dibangun dan asset yang diserahkan:



- Aplikasi sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat yang dapat dilihat pada: <http://simona.pksplipb.or.id>
- 7530 propagul mangrove,
- 1521 rumpun bibit lamun
- 1650 fragmen karang
- 50 unit rak besi transplantasi
- 50 rak PVC transplantasi

Penerima Manfaat atau Aset

Nama Infrastruktur / Aset	Lokasi	Ukuran / Jumlah	Status Lahan Untuk Infrastruktur	Penerima Manfaat
Mangrove	Yensawai	5000 Bibit	Umum	Kelompok Korbon
Rak besi transplantasi	Yensawai	50 Unit	Kelompok	Kelompok Terumbu Karang
Rak PVC transplantasi	Yensawai	50 Unit	Kelompok	Kelompok Terumbu Karang
Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat http://simona.pksplpb.or.id	Provinsi Papua Barat	1 Aplikasi	Umum	Bappeda Provinsi Papua Barat

Daftar Aset

Nama Aset	Lokasi	Ukuran / Jumlah	Status Lahan (Untuk infrastruktur)	Penerima Manfaat	Umur Pemakaian	Status
Alat Dasar Selam (Masker, Snorkel, Fins)	Yensawai	4 Set	Kelompok	Kelompok	3 Tahun	Baik
Kamera Underwater	Yensawai	1 Buah	Kelompok	Kelompok	3 Tahun	Baik

PEMBELAJARAN

- Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3K) adalah salah satu perangkat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (WP-3K) Provinsi Papua Barat secara kolaboratif di era otonomi daerah
- Provinsi Papua Barat telah memiliki dasar dan landasan yang berbasis ilmiah untuk menjalankan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu. Hal ini sangat mendukung visi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan (Provinsi Konservasi).



- Dokumen rencana teknis protokol implementasi RZWP-3-K berisi instrumen pengelolaan berupa perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang pesisir, mekanisme pemantauan dan evaluasi tata ruang pesisir.
- Adanya kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis untuk pemanfaatan di kawasan konservasi berbasis daya dukung nantinya dapat membantu kinerja dan pelengkapan dokumen pengelolaan kawasan konservasi, dalam hal ini BKKPN UPT Kupang Satker Raja Ampat dan BLUD Papua Barat, sehingga bisa melengkapi Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang sudah ada sebagai dokumen turunan dari RPZ
- Sistem monitoring dan evaluasi (monev) Implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat yang dibangun dan diimplementasikan dapat memungkinkan setiap orang dan lembaga untuk bisa berpartisipasi dalam proses monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.
- Sistem monev implementasi RZWP-3-K bersifat sangat dinamis yang dapat diupdate setiap saat karena adanya input dari masyarakat secara luas di manapun dan kapanpun. Sistem ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RZWP-3-K sehingga dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
- Capaian peningkatan kapasitas peserta pelatihan dari semua pelatihan ataupun training yang dilakukan menunjukkan hasil diatas target awal. Hal ini menunjukkan bahwa peserta dapat menyerap materi dengan baik dan dapat membantu peserta yang merupakan pemangku kepentingan untuk dapat membantu percepatan implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat.
- Pendekatan sosial-ekologi mampu meningkatkan keberhasilan rehabilitasi ekosistem pesisir (social-ecological rehabilitation). Hal ini juga dapat menumbuhkan motivasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sehingga mampu memunculkan inovasi dan inisiatif warga Kampung Yensawai Barat, salah satunya dengan berhasil membuat metode korbon pancang sebagai salah satu teknik rehabilitasi mangrove yang sesuai untuk diterapkan di kampung mereka.





PAKET-5

Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS)

Mitra Pelaksana:
Yayasan Terumbu Karang
Indonesia (Terangi)



LATAR BELAKANG

Pengelolaan Kawasan konservasi memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pengelola Kawasan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam hal pemanfaatan Kawasan namun juga dalam hal pengawasan kawasan konservasi. Untuk itu dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dalam kawasan konservasi. Dalam hal ini tentunya masyarakat memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mendukung program pengawasan kawasan konservasi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas. Dukungan sarana dan prasarana juga diperlukan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan.

INFORMASI PROYEK

Pelaksana:
COREMAP - CTI WB
Indonesian Climate Change Trust
Fund (ICCTF) - PPN/Bappenas

Periode:
Agustus 2020 - Maret 2022

Total Hibah:
US \$1.344.300

Mitra Pelaksana:
Yayasan terumbu Karang
Indonesia (TERANGI)

Tujuan:
Penguatan kapasitas masyarakat
dan kelompok masyarakat
pengawas (POKMASWAS) dalam
pengawasan kawasan konservasi.

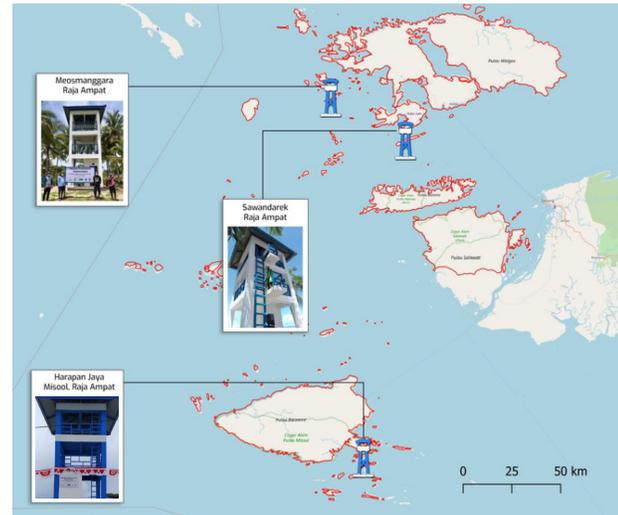
Lokasi:

- Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat - Provinsi Papua Barat
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat - Provinsi Papua Barat
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Misool, Kabupaten Raja Ampat - Provinsi Papua Barat





Lokasi Pembangunan Menara pengawas di Nusa Tenggara Timur



Lokasi Pembangunan Menara pengawas di Raja Ampat

CAPAIAN PROGRAM

I. Legalitas dan Rencana Kerja POKMASWAS

- 23 SK POKMASWAS level Provinsi yang telah terbit di Provinsi NTT dan Papua Barat.
- 21 rencana pengawasan di SAP Raja Ampat, KKPD Selat Dampier, KKPD Misool dan TNP Laut Sawu, telah disepakati.
- 21 buah peta area kerja dan kesepakatan POKMASWAS telah disepakati.

II. Capacity Building Sumber Daya Manusia (SDM)

- Terlaksananya Seminar Nasional Strategi Pengawasan Bersama Berbasis Masyarakat di Jakarta
- Terlaksananya workshop pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan, Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 2 Tentang Pengawasan Tingkat Lanjut, Workshop Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 3 tentang Pengawasan dengan Teknologi Aerial di Laut Sawu-Provinsi NTT dan Pokmaswas Kabupaten Raja Ampat.
- Terlaksananya forum koordinasi pokmaswas untuk area TNP Laut Sawu sebanyak 2 kali dan Kabupaten Raja Ampat sebanyak 2 kali
- Terlaksananya 2 kali kegiatan sertifikasi selam tingkat dasar dan tingkat lanjut untuk masyarakat, staf daerah dan staf nasional.

III. Sarana dan Pra Sarana Infrastruktur

- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Desa Loborai, Kabupaten Sabu Raijua-Provinsi NTT
- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Desa Kenduwela, Kabupaten Sumba Barat Daya-Provinsi NTT
- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Desa Nuca Molan, Kabupaten Manggarai-Provinsi NTT
- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Kampung Meosmanggara, Kabupaten Raja Ampat - Provinsi Papua Barat



- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Kampung Sauwandarek, Kabupaten Raja Ampat-Provinsi Papua Barat
- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Desa Oeseli, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT
- Terbangunnya 1 unit menara pengawas di Kampung Harapan Jaya, Misool, Provinsi Papua Barat
- 9 Perahu Pengawas (2 di SAP Raja Ampat, 2 di KKPD Kepulauan Raja Ampat, 2 di Kabupaten Rote Ndao, 1 di Kabupaten Sabu Raijua, 1 di Kabupaten Manggarai dan 1 di Kabupaten Sumba Barat Daya).

IV. Kegiatan Pengawasan

- Ter distribusinya 23 unit peralatan pengawasan untuk POKMASWAS.
- Disepakati dan ditandatanganinya 21 dokumen SOP penggunaan peralatan pengawasan.
- Disepakati dan ditandatanganinya 2 buah dokumen SOP penyaluran operasional mingguan
- POKMASWAS diProvinsi Papua Barat dan NTT
- Terlaksananya kegiatan pengawasan oleh 21 POKMASWAS di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu.



PEMBELAJARAN

- Perlu adanya pelibatan secara aktif para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu capaian program.
- *Capacity Building* SDM yang dilakukan melalui pengembangan kurikulum pelatihan yang sudah diujikan dan berbasis sumberdaya lokal dengan memadukan teori (30%), praktik dan simulasi (70%) membuat peserta lebih mampu menyerap materi yg disampaikan.
- *Adaptive* penggunaan istilah atau bahasa lokal dalam pembelajaran di masing-masing lokasi sangat membantu implementasi pengawasan kawasan konservasi.



Aset Kapal



ANAKALANG - Kenduwela Sumba Barat Daya



TARUNJU - Nuca Molas Manggarai



KP ITA ESA - Daiman Rote



HA ADE - Lobarai Sabu





PAKET-6

Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat

Mitra Pelaksana:

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)



LATAR BELAKANG

Yayasan PILI adalah lembaga swadaya masyarakat yang program dan kegiatannya berorientasi pada konservasi alam dan lingkungan. Bersama dukungan Bank Dunia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF, Yayasan PILI melaksanakan program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative untuk paket 6 mengenai akses masyarakat adat dalam mengelola sumber daya perikanan.

Kegiatan ini akan mengoptimalkan kemitraan kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) dalam pengawasan perairan dan perikanan berkelanjutan di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

INFORMASI PROYEK

Pelaksana:

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)

Periode:

Agustus 2020 - Maret 2022

Mitra Pelaksana:

Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)

Tujuan:

Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat di TNP Laut Sawu, Provinsi NTT dan SAP Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Lokasi: TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat





TNP Laut Sawu

Kabupaten Rote Ndao termasuk salah satu dari 10 kabupaten yang berada di TNP Laut Sawu. Kebanyakan penduduk Rote Ndao bekerja sebagai nelayan. Saat tidak bisa melaut, mereka akan melakukan budi daya rumput laut atau berkebun. Orang Rote mengenal kearifan lokal yang disebut 'hoholok' atau 'papadak' untuk mengelola sumber daya terestrial dan perairan. Kearifan lokal ini diawasi oleh penjaga adat yang disebut 'manaholo'.

Sebelum kemerdekaan, Rote menganut sistem pemerintahan kerajaan yang disebut 'nusak' dengan pemimpin yang disebut 'manek' atau raja. Setelah kemerdekaan, kesembilan belas nusak yang ada di Rote Ndao setara dengan tingkat kecamatan. Oelua di bagian barat dan Sotimori di bagian timur Rote, dipilih sebagai dua lokasi kegiatan Yayasan PILI.

Desa Oelua, Kecamatan Loaholu

- Dahulu Oelua masuk dalam wilayah Nusak Dengka, kerajaan terbesar dari 19 nusak di Rote Ndao
- Secara administratif Oelua berada di Kecamatan Loaholu
- Terdapat delapan dusun, lima di antaranya merupakan dusun pesisir.

- Mata pencaharian penduduk Oelua didominasi nelayan tangkap
- Yayasan PILI membentuk tiga kelompok masyarakat dalam bidang perikanan:
 1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan
 2. Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Tulufali
 3. Manaholo Desa Oelua

Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko

- Dahulu Sotimori masuk dalam wilayah Nusak Landu, kerajaan tertua yang budayanya paling dihormati
- Secara administratif berada di Kecamatan Landu Leko
- Terdapat empat dusun di Sotimori
- Mata pencaharian penduduk Sotimori didominasi petani budidaya rumput laut
- Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nale Tasi, terdiri dari tiga divisi:
 1. Divisi petani budi daya rumput laut
 2. Divisi pengolahan dan pemasaran perikanan
 3. Divisi pengawasan ekosistem pesisir dan laut



SAP Kepulauan Raja Ampat

Terdapat 5 kampung yang termasuk dalam SAP Kepulauan Raja Ampat yaitu Kampung Manyafun, Meosmanggara, Mutus, Waisilip, dan Bianci. Pulau-pulau ini dipercaya merupakan tanah ulayat masyarakat Suku Maya. Namun demikian masyarakat yang bermukim berasal dari Suku Betew/ Besar yang merupakan sub-suku Biak yang telah lama bermukim di Raja Ampat.

Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan

- Melalui diskusi 'Tiga Batu Satu Tungku' bersama ketua adat, kepala kampung, dan ketua agama dari masing-masing kampung, Mutus dipilih sebagai lokasi kegiatan Yayasan PILI.
- Masyarakat Mutus mengenal kearifan lokal 'kabrut' yang lambat laun diucapkan sebagai 'kabus'. Cerita mistis yang disematkan dalam area yang di-kabus akan membuat orang tidak mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut.
- Setelah Agama Kristen Protestan masuk Mutus pada 1950-an, diperkenalkanlah aturan tanpa cerita mistis. Kabus diganti dengan sasi gereja dan sasi adat. Masuknya Kristen Protestan juga melahirkan konsep Tiga Batu Satu Tungku sebagai unsur pemimpin kampung.
- Secara administratif, Mutus berada di Distrik Waigeo Barat Daratan. Penduduk Mutus masih mengandalkan perikanan tangkap sebagai pekerjaan utama.
- Yayasan PILI mencoba mendorong potensi di bidang perikanan lainnya, dengan membentuk delapan kelompok masyarakat:
 1. KUB Inkonem
 2. KUB Mujur
 3. Poklahsar Manyarido
 4. Poklahsar Mandemor
 5. Pokdakan Ingkoi
 6. Pokdakan Koraswan
 7. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Barawan Jaya
 8. Pokmaswas Mambri

Capaian

- Kesepakatan pembentukan Panitia dan atau Kelompok Kerja (Pokja) KMHA
- Kajian kelayakan kelembagaan adat di dua lokasi pilot
- Pemetaan partisipatif tenurial system KMHA di dua lokasi pilot
- Kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan mengenai praktik RBSFM
- Data primer hasil survei sumber daya udang sebagai dukungan terhadap kajian bioekonomi sumber daya udang secara nasional
- Pembentukan kelompok masyarakat di Oelua dan Sotimori, Rote Ndao, dan di Kampung Mutus, Raja Ampat
- Kajian bioekonomi sederhana perikanan karang di Oelua, Sotimori, dan Mutus
- Pendampingan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pengolahan hasil perikanan untuk kelompok masyarakat
- Penyusunan dokumen rencana pengelolaan perikanan berbasis hak di Oelua, Sotimori, dan Mutus
- Draft Naskah Akademik KMHA di SAP Kepulauan Raja Ampat
- Finalisasi Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rote Ndao
- Kajian dampak pengelolaan perikanan berkelanjutan secara partisipatif
- Kemitraan berupa berita acara atau Perjanjian perjanjian kerja sama kelompok masyarakat dengan instansi pemerintahan dan swasta

Strategi Purna-Program

- Membuat mekanisme dan rencana kerja, termasuk skema pembiayaan, bagi kelompok masyarakat
- Mengintegrasikan kelompok dengan Badan Usaha Milik Desa untuk menjamin keberlanjutan kegiatan kelompok
- Mengintegrasikan kegiatan Coremap-CTI dengan kegiatan pada kementerian atau lembaga (pembinaan, bantuan pemerintah)
- Pelatihan pembuatan proposal kerja sama atau kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), ataupun pihak swasta
- Melibatkan OPD dan UPT pada setiap kegiatan untuk *transfer knowledge*

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gelar senat untuk menggali informasi mengenai aktivitas perikanan masyarakat di Mutus



Pendampingan pengolahan perikanan di Oelua



Pemetaan partisipatif dan pelaksanaan prinsip FPIC di Mutus



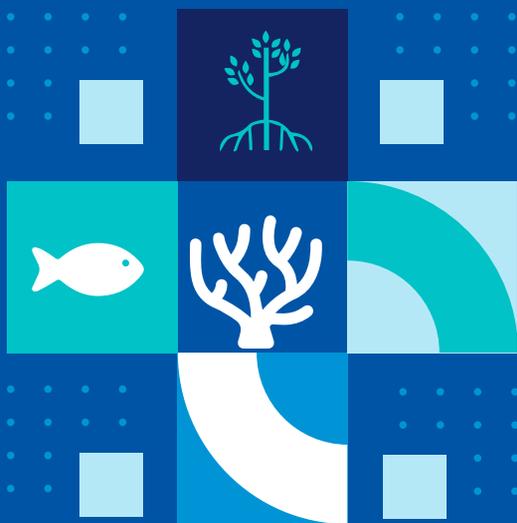
Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) Rote Ndao



Penitipan peralatan pendukung RBSFM dan pengolahan perikanan kepada kelompok masyarakat di Mutus



Penitipan peralatan pendukung RBSFM kepada kelompok masyarakat di Sotimori





PROFILE PROGRAM

COREMAP - CTI

Papua Barat & Nusa Tenggara Timur

Melestarikan Terumbu Karang
untuk Kesejahteraan Masyarakat

Indonesia Climate Change Trust Fund

Lippo Kuningan 15th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 12940, Indonesia.

Phone : (+62 21) 80679386 (Hunting)

Fax : (+62 21) 80679387

Email : secretariat@icctf.or.id

 www.icctf.or.id

 Indonesia Climate Change Trust Fund

 [ICCTFofficial](https://www.instagram.com/ICCTFofficial)

 [@ICCTF_ID](https://twitter.com/ICCTF_ID)

 secretariat@icctf.or.id

